



# RENCANA KERJA TH. 2023

DINAS PEREMPUAN DAN ANAK  
PROVINSI JAWA TENGAH



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan HidayahNya, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renja ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2023.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, mengamanatkan mekanisme, cara, dan metode dalam penyusunan dokumen satu tahunan bagi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Sebagai bagian dari pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk menyusun program yang selaras dengan dokumen yang lebih tinggi dan merumuskan program dan kegiatan yang progresif untuk menjawab permasalahan yang ada.

Penyusunan Renja disusun secara partisipatif dan melibatkan banyak pihak baik internal maupun eksternal. Penyusunan Renja ini merupakan langkah awal penyusunan program kegiatan yang sesuai dengan ketentuan. Kami mengakui masih banyak kekurangan dan perlunya penyempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Oleh karena itu kerja keras dari semua pihak terutama dari unsur pimpinan dan staf yang ada di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah patut disyukuri.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan oleh peran multi pihak dan sektoral sehingga Renja ini dapat selesai disusun. Renja ini akan kami jadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

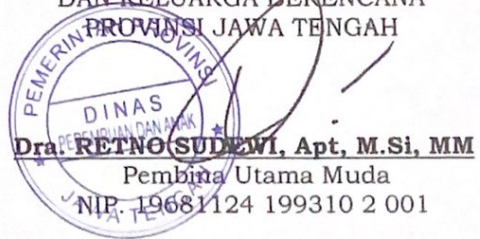
Renja ini wajib dipedomani oleh seluruh pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, sehingga semua komponen harus berkomitmen mewujudkan tercapainya indikator kinerja program kegiatan serta tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan pada Renja Dinas tahun 2023.

Kedepan, hal yang harus segera kami lakukan adalah peningkatan kapasitas pegawai sehingga target capaian Renja Tahun 2023 yang ada pada

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat tercapai.

Semoga apa yang kita rintis berupa perencanaan yang partisipatif dan sesuai ketentuan yang ada menjadi langkah awal kami menjalankan program dan kegiatan.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023.

Semarang, November 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681124 199310 2 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	42
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>45</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>128</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

1.1	Bagan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Perubahan .....	2
-----	---	---

## **DAFTAR TABEL**

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah .....	10
2.2	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Prov. Jawa Tengah.....	16
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah.....	36
3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023.....	43
4.1	Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah.....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

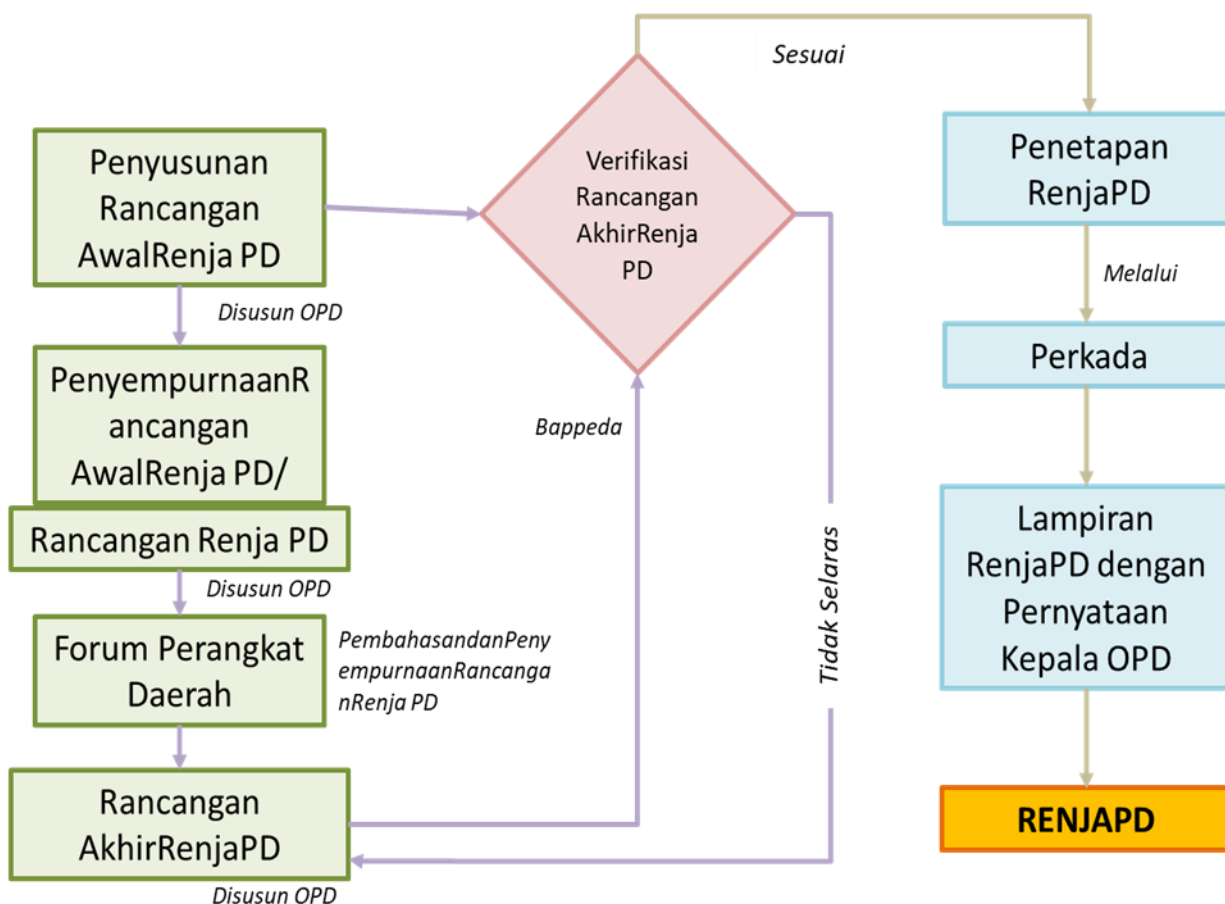
### **1.1. Latar Belakang**

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat/stakeholder terkait.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai tindak lanjut Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana PembUangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja Perangkat Daerah disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Provinsi Jawa Tengah pada tahun berkenaan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah melalui beberapa tahap yaitu Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan Forum OPD dan Penetapan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut :

## Bagan 1. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

Rancangan Awal RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja RKPD dan harus sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mengacu pada kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 yang dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Selain hal tersebut, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dituangkan di dalam Renstra Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Pemutahiran Permendagri 90/2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Povinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
36. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37);

38. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 212/PER/B1/2015 tentang Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 76);
41. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 51);
42. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 65);
43. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 95);
44. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023;
45. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018-2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah memberikan arah dan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh unsur internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun.
2. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selama satu tahun.
3. Sebagai alat untuk menyelaraskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan selama satu tahun.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah:

#### **BAB I      Pendahuluan**

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II     Hasil Evaluasi Perangkat Daerah**

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020, 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 serta kaitannya dengan capaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, analisis laporan kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta rewiu terhadap Rancangan Awal RKPD.

**BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Berisi uraian ringkas tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

**BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Berisi uraian ringkas tentang rumusan program dan kegiatan perangkat daerah, indikator kinerja dan kelompok sasaran pencapaian Renja Perangkat Daerah dan pendanaan indikatif beserta sumbernya tahun 2023 serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif tahun 2024.

**BAB V Penutup**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022**

Keberhasilan Kinerja dapat dilihat dari realisasi capaian program dan kegiatan yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, capaian pelaksanaan program dan kegiatan harus di evaluasi secara berkala dan menyeluruh.

Capaian Kinerja Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dalam pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan wajib non pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021**  
**Provinsi Jawa Tengah**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2				<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
2	08			<b>BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
2	08	02		<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi	30%	30%	30%	30%	100
2	08	02	101	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	73 OPD	73 OPD	73 OPD	73 OPD	100
2	08	02	102	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi	350 Orang	30 Orang	120 Orang	470 Orang	391,67
					Jumlah perempuan yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendapatkan pengetahuan politik	1.400 Orang	3.389 orang	1.200 orang	1.299 orang	108,25
2	08	02	103	Jumlah perempuan yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendapatkan pengetahuan politik	Jumlah lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	5 Kelompok	10 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	100
2	08	03		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Rasio korban kekerasan terhadap perempuan</b>	<b>5,64 per 100.000</b>	<b>5,75 per 100.000</b>	<b>5,76 per 100.000</b>	<b>5,11 per 100.000</b>	<b>112,72</b>
					<b>Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejang</b>	<b>20%</b>	-	-	-	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	08	03	101	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa	967 kasus	980 kasus	987 kasus	937 kasus	105,34
2	08	03	102	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100
2	08	03	103	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	100
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>04</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender</b>	<b>40%</b>	-	-	-	-
					<b>Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak</b>	<b>40%</b>	-	-	-	-
2	08	04	101	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender terlayani	100%	100%	100%	100%	100
					Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani	100%	100%	100%	100%	100
2	08	04	102	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan	100 Kelompok	30 kelompok	20 kelompok	20 kelompok	100
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>05</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2	08	05	101	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan data dan informasi PPA	28 dokumen	5 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>06</b>		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama</b>	<b>100%</b>	<b>88,57%</b>	<b>91,43%</b>	<b>100%</b>	<b>109,37</b>
					<b>Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)</b>	<b>25%</b>	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	08	06	101	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya	35 Kab/kota	31 Kab/kota	35 Kab/kota	35 Kab/kota	100
					Jumlah Forum Anak provinsi dan kab/kota yang terlibat proses pembangunan	35 kab/kota	35 kab/kota	35 kab/kota	35 kab/kota	100
2	08	06	102	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	100
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>07</b>		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Rasio korban kekerasan terhadap anak</b>	<b>12,36 per 100.000</b>	<b>12,15 per 100.000</b>	<b>12,44 per 100.000</b>	<b>11,02 per 100.000</b>	<b>112,89</b>
					<b>Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring</b>	<b>20%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2	08	07	101	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	1.158 kasus	1.074 kasus	1.178 kasus	1.085 kasus	108,57
2	08	07	102	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100
2	08	07	103	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	15 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok	100
<b>2</b>	<b>14</b>			<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>						
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>02</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk</b>	<b>41,67%</b>	<b>6,33%</b>	<b>11,42%</b>	<b>19,44%</b>	<b>170,23</b>
					<b>Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2	14	02	101	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun	1 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	7 dokumen	233,33

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	14	02	102	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi yang dipublikasikan	5 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>03</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)</b>	<b>30%</b>	<b>28,69%</b>	<b>26,39%</b>	<b>28,42%</b>	<b>107,69</b>
					<b>Unmeetneed KB</b>	<b>12,76%</b>	<b>12,90%</b>	<b>12,66%</b>	<b>14,29%</b>	<b>88,59</b>
2	14	03	101	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB MKJP	1.443.023 Orang	1.364.801 orang	1.394.922 orang	1.281.135 orang	91,84
2	14	03	102	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tidak berKB	701.746 orang	845.979 orang	767.025 orang	915.523 orang	83,78
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>04</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan</b>	<b>91%</b>	<b>96,59%</b>	<b>68,25%</b>	<b>112,61%</b>	<b>165</b>
					<b>Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan</b>	<b>96,3%</b>	<b>99,01%</b>	<b>85,57%</b>	<b>114,46%</b>	<b>133,76%</b>
					<b>Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota</b>	<b>30%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2	14	04	101	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok tribina yang aktif	21.540 Kelompok	24.348 Kelompok	26.751 Kelompok	23.856 Kelompok	89,18
2	14	04	102	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKA yang aktif	7.000 Kelompok	10.734 Kelompok	15.422 Kelompok	9.662 Kelompok	62,65
					Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga	35%	-	-	-	-
<b>X</b>				<b>Non Urusan</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>X</b>	<b>XX</b>			<b>Eks BAU</b>						
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100</b>
					<b>Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					<b>OPD</b>					
X	XX	01	101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
X	XX	01	102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100
X	XX	01	103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	-	-	-	-
X	XX	01	105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	-	-	-	-
X	XX	01	106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	1 Laporan	-	-	-	-
X	XX	01	107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	-	-	-	-
X	XX	01	108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	-	-	-	-
X	XX	01	109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	-	-	-	-

**Tabel 2.2**  
**Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**  
**Provinsi Jawa Tengah**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)		
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
<b>2</b>	<b>08 02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan</b>	<b>6,84</b>	<b>6,42</b>	<b>6,42 100</b>		
2	08 02	101	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi	60%	40%	40%	100
2	08 02	102	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial	40%	30%	30%	100
<b>2</b>	<b>08 03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Rasio korban kekerasan terhadap perempuan</b>	<b>5,64 per 100.000</b>	<b>5,7 per 100.000</b>	<b>5,7 per 100.000 100</b>		
			<b>Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring</b>	<b>20%</b>	<b>15%</b>	<b>15% 100</b>		
2	08 03	101	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan	13,889%	8,3333%	8,3333%	100
2	08 03	102	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	100%	100%	100%	100%
2	08 03	103	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
							Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	
				Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi	20 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	100	
2	08	04		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender</b>	<b>40%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>100</b>
					<b>Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak</b>	<b>40%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>100</b>
2	08	04	101	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Layanan Konsultasi Keluarga yang responsif gender	50%	40%	40%	100
2	08	04	103	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan konsultasi keluarga dalam pemenuhan hak anak	48,57%	42,85%	42,85%	100
2	08	05		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi</b>	<b>20%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>100</b>
2	08	05	101	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	7 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	100
2	08	06		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
					<b>Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)</b>	<b>25%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100</b>
2	08	06	101	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA	35 Kab/kota	35 Kab/kota	35 Kab/kota	100
2	08	06	102	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	15 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	100
2	08	07		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Rasio korban kekerasan terhadap anak</b>	<b>12,36 per 100.000</b>	<b>12,46 per 100.000</b>	<b>12,46 per 100.000</b>	<b>100</b>
					<b>Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring</b>	<b>20%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>100</b>
2	08	07	101	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak	13,889%	8,3333%	8,3333%	100
2	08	07	102	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang	Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)			
	Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	standar							
2	08	07	103	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	15 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok	100
					Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi	15 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	100
<b>2</b>				<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>02</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang</b>	<b>27,7%</b>	<b>19,44%</b>	<b>19,44%</b>	<b>100</b>
					<b>Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)</b>	<b>35%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>100</b>
2	14	02	101	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK	10 Kab/kota	7 Kab/kota	7 Kab/kota	100
2	14	02	102	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	10 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>03</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)</b>	<b>30%</b>	<b>29,5%</b>	<b>29,5%</b>	<b>100</b>
					<b>Unmetneed KB</b>	<b>12,76%</b>	<b>12,89%</b>	<b>12,89%</b>	<b>100</b>
2	14	03	101	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah peserta KB Aktif	4.901.017 Orang	4.282.778 Orang	4.282.778 orang	100
2	14	03	102	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Persentase peran aktif PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa) dalam pembinaan kesertaan berKB	17,5%	11,7%	11,7	100
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>04</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN</b>	<b>Persentase UPPKA yang aktif</b>	<b>91%</b>	<b>90,5%</b>	<b>90,5%</b>	<b>100</b>

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
								Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)				(3)	(4)	(9)	(10)	(11)
				<b>PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>melaporkan kegiatan</b>				
					<b>Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan</b>	<b>96,3%</b>	<b>96,25%</b>	<b>96,25%</b>	<b>100</b>
					<b>Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota</b>	<b>30%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>100</b>
2	14	04	101	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok tribina yang aktif	21.540 Kelompok	21.596 Kelompok	21.596 Kelompok	100
2	14	04	102	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKA yang aktif	7.000 Kelompok	7.333 Kelompok	7.333 Kelompok	<b>100</b>
					Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga	35%	30%	30%	100
<b>X</b>				<b>NON URUSAN</b>		-			
<b>X</b>	<b>XX</b>			<b>Eks BAU</b>					
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100</b>
					<b>Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
X	XX	01	101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X	XX	01	102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
X	XX	01	103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100
X	XX	01	105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100
X	XX	01	106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100
X	XX	01	107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100
X	XX	01	108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
								Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)
X	XX	01	109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator kinerja pada urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan wajib non pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
<b>A</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>										
1	Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi			30	-	-	30	-	-	-	
2	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan			-	6,42	6,84	-	6,42	6,84	7,20	
3	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender			-	35	40	-	63,88	40	50	
4	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak			-	35	40	-	63,88	40	50	
5	Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya			91,43	-	-	100	-	-	-	
6	Persentase Kabupaten/kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama			-	94,28	100	-	100	100	100	
7	Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)			-	20	25	-	20	25	25	
8	Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia			100	-	-	100	-	-	-	
9	Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi			-	15	20	-	15	20	30	
10	Persentase kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring			-	15	20	-	15	20	30	
11	Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender terlayani			100	-	-	100	-	-	-	
12	Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani			100	-	-	100	-	-	-	
13	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan			5,76	5,7	5,64	5,76	5,76	5,64	5,52	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
14	Rasio korban kekerasan terhadap anak			12,44	12,46	12,36	12,44	12,44	12,36	12,24	
15	Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring			-	15	20	-	13	20	25	
16	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan sesuai standar			100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan sesuai standar			100	100	100	100	100	100	100	
18	<b>URUSAN DALDUK KB</b>										
19	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk			11,42	-	-	19,44	-	-	-	
	Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)			-	25	35	-	25	35	40	
20	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)			26,39	29,5	30	26,39	26,39	30	35	
21	Unmetneed KB			12,66	12,89	12,76	12,66	12,66	12,76	12,58	
22	Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif			100	-	-	100	-	-	-	
23	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang			-	19,44	27,7	-	-	27,7	30,2	
24	Indeks Pembangunan Keluarga			-	54,38	56,29	-	-	56,29	57,53	
25	Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota			-	25	30	-	25	30	35	
26	Persentase kelompok tribina yang aktif			85,57	-	-	85,57	-	-	-	
27	Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan kegiatan			-	96.25	96.3	-	100	96.3	96,75	
28	Persentase UPPKS yang aktif			68,25	-	-	68,25	-	-	93	
29	Persentase UPPKA yang aktif yang melaporkan kegiatan			-	90.50	91	-	100	91	92	
30	<b>EKS BAU</b>										
31	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah			90	90	90	90	90	90	90	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah			-	90	90	-	90	90	90	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
32	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD			-	100	100	-	75	100	100	

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dimulai dari keselarasan indikator kinerja pada dokumen perencanaan perangkat daerah dan implementasi kegiatan secara integratif. Koordinasi dan sinergi program dan kegiatan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana harus bersinergis dengan baik. Usulan kebutuhan kegiatan teknis di Kabupaten/Kota telah diakomodir dan menjadi bahan penyusunan program kegiatan di tingkat provinsi. Kegiatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan di masing-masing Kabupaten/Kota dengan tetap selaras dengan capaian target indikator kinerja di tingkat provinsi dan indikator kinerja di tingkat Kabupaten/Kota sendiri.

Koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilakukan melalui penyelarasan penyusunan dokumen Renstra antara Renstra Kementerian dengan Renstra Perangkat Daerah di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyelarasan tersebut diharapkan akan mampu memberikan hasil yang optimal antara pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencapaian kinerja pembangunan nasional. Pengintegrasian 5 (lima) arahan Presiden Republik Indonesia antara lain Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan, Peningkatan Peran Ibu dalam Pendidikan Anak, Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Pencegahan Perkawinan Anak telah dimasukkan dalam program dan kegiatan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan arahan Presiden terkait Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adanya Program strategis hasil Kerjasama antara Kementerian PP PA dan Kementerian PDT, yaitu lahirnya kebijakan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). DRPPA merupakan Desa yang mengintegrasikan **perspektif gender dan hak anak** dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara

terencana, menyeluruh, berkelanjutan. Sehingga pada saat ini, lokus program dan kegiatan tahun 2023 akan diarahkan pada DRPPA.

Selain itu, adanya Instruksi Presiden terkait Kampung Keluarga Berkualitas mendorong implementasi pembangunan ketahanan keluarga dengan mensinergikan program pembinaan kader Tribina dan KIE KB untuk mendorong kuantitas dan kualitas penduduk.

Permasalahan dan hambatan internal yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain :

1. Terbatasnya jumlah SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
2. Belum optimalnya kompetensi SDM yang ada, sehingga masih perlu pengembangan kapasitas;
3. Terbatasnya sarana prasarana yang tersedia dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi.

Permasalahan dan hambatan tersebut memang tidak terlalu berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional, dikarenakan ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang ada dioptimalkan dengan semaksimal mungkin. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain:

**1. Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak :**

- a. Belum maksimalnya kesetaraan gender di bidang politik dan ekonomi;
- b. Masih rendahnya akses sumberdaya ekonomi bagi perempuan.
- c. Rendahnya implementasi kebijakan PUG di perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Semakin kompleksnya kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada masa pandemi;
- e. Kuatnya budaya patriarkhi di masyarakat yang menyebabkan sulit tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan keluarga;
- f. Belum optimalnya implementasi kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten/Kota;
- g. Belum optimalnya jejaring kelembagaan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak;

- h. Belum semua lembaga/instansi/produsen data yang memiliki ketersediaan data pilah gender dan anak.

## **2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :**

- a. Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kependudukan;
- b. Masih rendahnya Kabupaten/kota yang menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK);
- c. Rendahnya komitmen Kepala Daerah untuk memprioritaskan GDPK sebagai acuan Pembangunan Kependudukan di daerah.
- d. Rasio PLKB dengan jumlah desa yang tidak proporsional;
- e. Banyaknya kader KB baru (PLKB dan PPKBD) yang belum memahami program Bangga Kencana;
- f. Meningkatnya jumlah PUS dan angka *Unmetneed*;
- g. Belum optimalnya ketahanan keluarga sebagai upaya untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga;
- h. Belum optimalnya peran aktif kelompok Tribina dan UPPKS dalam meningkatkan ketahanan keluarga;
- i. Belum optimalnya peran serta mitra kerja dalam mendukung program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.

Sedangkan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :

### **1. Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak :**

- a. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- b. Kewajiban perangkat daerah Provinsi untuk menyusun analisis gender melalui GAP/PROBA dan GBS dalam mengimplementasikan PUG pada program dan kegiatan perangkat daerah;
- c. Tersedianya pedoman dan modul tentang PUG, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
- d. Adanya Perda Jawa Tengah nomor 2 tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;

- e. Koordinasi lintas sektor dalam upaya penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak (OPD, Rumah Sakit, NGO, dan APH);
  - f. Adanya Perda nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
  - g. Adanya Pergub nomor 33 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan
  - h. Adanya kerjasama atau MOU antar Provinsi (tujuh Provinsi dan sepuluh Provinsi MPU) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO;
  - i. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui KLA;
  - j. Adanya Perda Jawa Tengah nomor 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - k. Adanya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  - l. Adanya dukungan dari unsur pentahelix dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
  - m. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat provinsi dan di 35 kabupaten/kota;
  - n. Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Satuan Pendidikan Ramah Anak, Pesantren Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;
  - o. Tersedianya aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak yang dinamis.
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
    - a. Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat nasional dan Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
    - b. Adanya amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 sebagai kewajiban daerah untuk menyusun Grand Design Pembangunan Keluarga (GDPK);

- c. Adanya amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- d. Komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penurunan laju pertumbuhan penduduk;
- e. Adanya dukungan dari Mitra Kerja (PKBI, TP PKK, TNI, POLRI, Lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya) dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
- f. Adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan **Kampung Keluarga Berkualitas**;
- g. Telah terbentuk Kampung KB di tiap kabupaten/kota;
- h. Adanya kader KB (PPKBD) sebagai pembantu PLKB di masing-masing desa dan kelurahan;
- i. Kemajuan teknologi sebagai sarana media informasi yang dapat digunakan untuk mendukung program KIE KB.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan antara lain:

#### **1. Kesenjangan gender**

Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah bagi perempuan masih dibawah rata-rata lama sekolah laki-laki sehingga perlu peningkatan akses pendidikan bagi perempuan. Selain itu juga, pengeluaran perkapita disesuaikan bagi perempuan masih dibawah pengeluaran perkapita laki-laki.

#### **2. Pemenuhan Hak Anak**

Perolehan penghargaan Kabupaten/Kota Menuju Layak anak dari berbagai kategori sebagai wujud pemenuhan hak anak dalam pembangunan pada tahun 2022 sebanyak 35 kabupaten/kota atau 100% dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. 35 kabupaten/kota tersebut, hanya 1 daerah (2,86%) yang mendapat kategori utama, sedangkan untuk kategori nindya sebanyak 7 daerah (20%), kategori madya sebanyak 17 daerah (48,57%) dan kategori pratama sebanyak 10 daerah (28,57%).

Beberapa Kabupaten/Kota yang mendapat kategori Kota/Kabupaten Layak Anak terendah dikarenakan belum implementasi kebijakan pemenuhan hak anak seperti sekolah ramah anak, puskesmas layak anak serta pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait pemenuhan hak anak seperti pentingnya desa/kelurahan ramah anak masih rendah sehingga perlu didorong agar pemenuhan hak anak dapat dirasakan merata di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

### **3. Perlindungan Perempuan dan Anak dari Segala Bentuk Kekerasan**

Korban kekerasan yang dilaporkan terhadap perempuan dan anak sampai dengan triwulan III tahun 2022 sebanyak 1.097 korban yang terdiri korban kekerasan perempuan sebanyak 508 orang dan korban kekerasan anak sebanyak 589 orang. Makin masifnya penggunaan teknologi (Internet, HP, Media Sosial) memberikan dampak meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO), sehingga perlu upaya keras untuk pencegahan dan penanganannya.

### **4. Kesertaan Keluarga Berencana**

Prosentase Penggunaan KB MKJP sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 27,83%. Adapun pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tetapi tidak ber-KB (unmeetneed) sampai dengan Triwulan III tahun 2022 sebesar 12,81%, mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 14,89%. Masih tingginya unmeetneed karena disebabkan antara lain karena rendahnya kesadaran Pasangan Usia Subur/PUS untuk ber-KB, sarana prasarana akses layanan KB masih rendah karena masih ada lokasi yang terpencil dan masih banyaknya pemahaman negatif tentang KB.

### **5. Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga**

Jumlah kelompok tribina yang aktif melaporkan kegiatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebanyak 21.854 kelompok, mengalami penurunan dibanding tahun 2021 sebanyak 21.856 kelompok. Keaktifan kelompok Tribina yang aktif mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2021, pada tahun

2021 sebesar 89,18%, kemudian naik menjadi 97,79% sampai dengan triwulan III tahun 2022.

Adapun kelompok UPPKA aktif yang melaporkan kegiatannya sampai dengan Triwulan III sebanyak 7.139 kelompok, mengalami penurunan dibanding tahun 2021 sebanyak 9.662 kelompok. Prosentase kelompok UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan sampai dengan Triwulan III tahun 2022 sebesar 97,38%. Masih rendahnya kapasitas kader tribina maupun uppka dalam mengadvokasi kelompoknya menjadi penyebab rendahnya kegiatan pada kelompok tribina dan UPPKA.

Kegiatan Strategis yang dapat mendorong pencapaian target program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

- a) Kegiatan urusan pemberdayaan perempuan akan lebih fokus diarahkan pada lokasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, dimana 10 indikator harus dapat diwujudkan melalui beberapa aktivitas yang mendukung pencapaian indikator tersebut.
- b) Mendorong peningkatan ekonomi bagi perempuan kelompok rentan, untuk mendorong peningkatan wirausaha baru perempuan yang kompeten dan mampu bersaing.
- c) Mendorong sosialisasi dan implementasi UU TKPKS sebagai upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d) Meningkatkan kapasitas perempuan di bidang politik melalui sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan.
- e) Mendorong implemmentasi PUG di Provinsi dan Kabupaten Kota sebagai upaya meningkatkan capaian IPG dan IDG di Jawa Tengah.
- f) Mendorong implementasi Pemenuhan Hak Anak (PHA) di Kabupaten/Kota secara optimal.
- g) Mendorong pencegahan kekerasan dan perkawinan usia anak melalui pengasuhan positif.
- h) Optimalisasi layanan terpadu/care center bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Kegiatan Strategis yang dapat mendorong pencapaian target program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

- a) Kegiatan yang akan dilanjutkan pada tahun 2023 adalah mendorong peningkatan kesertaan KB kepada masyarakat sebanyak 7.500 orang sebagai tindak lanjut rekomendasi DPRD untuk meningkatkan pemakaian kontrasepsi pada pasangan usia subur (PUS).
- b) Penggerakan KB gratis oleh mitra kerja muslimat NU, Aisyiyah, Bhayangkara, TMKK dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dengan target peserta 900 orang atau lebih.
- c) Sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak “Jo Kawin Bocah” kepada kader tribina (BKL, BKB dan BKR) dan Pengelola PIK Remaja.
- d) Advokasi Kabupaten/Kota untuk mendorong Kampung Berkualitas di desa atau kelurahan.
- e) Mendorong Kabupaten/Kota untuk Menyusun GDPK 5 Pilar sebagai acuan untuk mendorong kebijakan pembangunan keluarga secara sinergis dan berkelanjutan

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review atas Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Idikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif (Rp)	Program	Lokasi	Idikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.373.767.000					16.911.144.000	
		Semarang dan luar semarang	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	90%	14.920.267.000	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang dan luar semarang	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	90%	15.897.864.000	
		Semarang dan luar semarang	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	453.500.000		Semarang dan luar semarang	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	510.000.000	
2	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	6,84 per 100.000	2.557.500.000	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	6,84 per 100.000	2.785.000.000	
3	Perlindungan Perempuan				1.087.836.000					1.340.336.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5,64 per 100.000	1.087.836.000	Perlindungan Perempuan	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5,64 Per 100.000	1.340.336.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase kab/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan secara berjejing	20%	415.000.000		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase kab/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan secara berjejing	20%	435.000.000	

4	Peningkatan Kualitas Keluarga				175.000.000					275.000.000	
		Semarang dan luar Semarang	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender	40%	100.000.000	Peningkatan Kualitas Keluarga	Semarang dan luar Semarang	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender	40%	150.000.000	
		Semarang dan luar Semarang	Persentase layanan konsultasi keluarga yang berbasis pemenuhan hak anak	40%	175.000.000		Semarang dan luar Semarang	Persentase layanan konsultasi keluarga yang berbasis pemenuhan hak anak	40%	200.000.000	
5	Pemenuhan Hak anak (PHA)				639.210.000					754.000.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase kabupaten/kot a menuju layak anak minimal tingkat pratama	100%	539.210.000	Pemenuhan Hak anak (PHA)	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase kabupaten/kot a menuju layak anak minimal tingkat pratama	100%	620.000.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase keterisian indikator kabupaten/kot a layak anak (KLA)	25%	100.000.000		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase keterisian indikator kabupaten/kot a layak anak (KLA)	25%	100.000.000	
6	Perlindungan Khusus Anak				779.000.000					515.000.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12,36 per 100.000	642.500.000	Perlindungan Khusus Anak	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12,36 per 100.000	700.000.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase kabupaten/kot a yang sudah melaksanakan pendataan	20%	100.000.000		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase kabupaten/kot a yang sudah melaksanakan pendataan	20%	150.000.000	

			kekerasan secara berjejang					kekerasan secara berjejang			
7	Pengendalian Penduduk				330.000.000					400.000.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase pemerintah daerah yang menyusun GDPK 5 bidang	27,7%	305.000.000	Pengendalian Penduduk	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase pemerintah daerah yang menyusun GDPK 5 bidang	27,7%	460.000.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	35%	25.000.000		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	35%	50.000.000	
8	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				1.150.000.000					1.255.000.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	30%	1.175.000.000	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	30%	1.275.000.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Unmetneed KB	12,76%	80.000.000		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Unmetneed KB	12,76%	100.000.000	
9	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				350.000.000					450.000.000	
		Semarang dan luar Semarang	Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan kegiatan	96,3%	200.000.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Semarang dan luar Semarang	Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan kegiatan	96,3%	250.000.000	

		Semarang dan luar Semarang	Persentase kelompok UPPKA yang aktif melaporkan	91%	175.000.000		Semarang dan luar Semarang	Persentase kelompok UPPKS yang aktif melaporkan	91%	200.000.000	
		Semarang dan luar Semarang	Persentase keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di Kab/kota	30%	75.000.000		Semarang dan luar Semarang	Persentase keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di Kab/kota	30%	100.000.000	
10	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jawa Tengah	Persentase keterisian indikator oleh Kab/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi	20%	200.000.000	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jawa Tengah	Persentase keterisian indikator oleh Kab/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi	20%	300.000.000	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Provinsi Jawa Tengah**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>URUSAN PPPA</b>					
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				
1	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi	60%	
2	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial	40%	Sasaran : Prioritas Daerah miskin
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				
1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan	13,889%	
2	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan sesuai standar	100%	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah  Provinsi Jawa Tengah	- Jumlah lembaga penyedia layanan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya.  - Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi	8 kelompok  20 kelompok	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				
1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Persentase layanan konsultasi keluarga yang responsif gender	50%	
2	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Persentase layanan konsultasi keluarga dalam pemenuhan hak anak	48,57%	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>				
1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA	35 Kab/kota	
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	15 kelompok	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>				
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak	13,889%	
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	- Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan sesuai standar. - Jumlah lembaga yg dikuatkan dan dikembangkan bagi	100%  10 kelompok	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			anak yg membutuhkan perlindungan khusus		
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah  Provinsi Jawa Tengah	- Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya. - Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi	15 kelompok  15 kelompok	
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>				
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	7 kab/kota	
<b>URUSAN DALDUK KB</b>					
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>				
1	Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah peserta KB Aktif	4.901.017 Orang	
2	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB.	Provinsi Jawa Tengah	Persentase peran aktif PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa) dalam pembinaan kesertaan berKB.	17,5 %	
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>				
1	Kegiatan Pemaduan dan	Provinsi	Jumlah pemerintah	20	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jawa Tengah	daerah yang menyusun GDPK	kab/kota	
2	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	10 dokumen	
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>				
1	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah kelompok tribina yang aktif	21.540 kelompok	
2	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah	- Jumlah Kelompok UPPKA yang aktif.  - Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga	7.000 kelompok  35%	Sasaran : Prioritas Daerah miskin
<b>X</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>				
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	1 dokumen	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 laporan	
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 laporan	
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	1 laporan	
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik	2 laporan	

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tengah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 telah diselaraskan dengan Arah kebijakan pembangunan nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, RPJMN Tahun 2020-2024, Permen No 2-2020 Renstra KPPPA Tahun 2020-2024 dan Peraturan Kepala BKKBN No 6 tahun 2020 Renstra BKKBN Tahun 2020-2024 yang bertujuan :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA
4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan termasuk TPPO
5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA
7. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan Bahagia
8. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 yang telah dirubah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah untuk membantu Gubernur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah, antara lain : perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana,

advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, serta data dan partisipasi masyarakat.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Mendasarkan pada isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain : 1) kesenjangan gender; 2) pemenuhan hak anak; 3) perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan; 4) kesertaan keluarga berencana; 5) ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, tujuan Renja dirumuskan untuk :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak;
2. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Guna mendukung pencapaian tujuan Renja tersebut, sasaran difokuskan pada :

1. Meningkatnya pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA) di berbagai sektor pembangunan;
2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Meningkatnya kesertaan keluarga berencana;
4. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Meningkatnya komitmen dan peran serta jejaring kelembagaan masyarakat;

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksi OPD, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran dituangkan dalam table berikut.

**Tabel 3.1.**

**Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak		1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2. Persentase Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Daerah 3. Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak 4. Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka  %  %  Per 100.000	72,7  34,3  100  8.07
2.	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas		1. Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2.19
		Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	1. Persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kebijakan PUG 2. Persentase kab/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%  %	90  62,85
		Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8.02

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
		Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	65,17
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	56,29

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 terdiri dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah beserta pendanaan yang menunjang pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhatikan program prioritas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 selama satu tahun mendatang yang dituangkan dalam Rencana Program dan Kegiatan sesuai dengan RKPD Tahun 2023.

#### **a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Kegiatan diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Pembangunan sebesar 6,84 per 100.000.

#### **b. Program Perlindungan Perempuan**

Kegiatan diarahkan pada Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (dak); Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator penurunan rasio korban kekerasan terhadap perempuan sebesar 5,64 per 100.000; Persentase Kabupaten/Kota yang sudah Melaksanakan Pendataan Kekerasan secara Berjejing sebesar 20%.

#### **c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi; Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Penyelenggaraan Program Kualitas Keluarga Berbasis Gender sebesar 40%; Persentase

Penyelenggaraan Program Kualitas Keluarga Berbasis Pemenuhan Hak Anak sebesar 40%.

**d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

Kegiatan diarahkan pada Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Keterisian Indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi sebesar 20%.

**e. Program Pemenuhan Hak Anak**

Kegiatan diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama sebesar 100%; Persentase Keterisian Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebesar 25%.

**f. Program Perlindungan Khusus Anak**

Kegiatan diarahkan pada Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi (dak); Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Rasio Korban Kekerasan Terhadap Anak sebesar 12,36 per 100.000; Persentase Kabupaten/Kota yang sudah Melaksanakan Pendataan Kekerasan secara Berjejaring sebesar 20%.

**g. Program Pengendalian Penduduk**

Kegiatan diarahkan pada Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Pemerintah daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang sebesar 27,7%;

Persentase Kabupaten/Kota dalam Pendataan Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) sebesar 35%.

**h. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal; Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 30%; Unmetneed KB sebesar 12,76%.

**i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera**

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase UPPKS yang Aktif Melaporkan Kegiatan sebesar 91%; Persentase Kelompok Tribina yang Aktif Melaporkan Kegiatan sebesar 96,3%; Persentase Keterisian Indikator Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten/Kota sebesar 35%.

**j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Kegiatan diarahkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD sebesar 100%; persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah sebesar 90%.

Adapun Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif, sebagaimana pada Tabel 4.1. Adapun Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan:

**Tabel 4.1**  
**RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**Nama PD: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	<b>NON URUSAN</b>																
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%								86%			DP3AP 2KB
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,1%								79,15%			DP3AP 2KB

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,1%	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%					453.500	100%	466.991		Sekretariat
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	90%					12.897.864	90%	14.462.800		

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,1%	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	1 Dokumen	253.500	1 Dokumen	246.991	OPD Provinsi, Kota Semarang, DKI Jakarta	Subbag Program
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,1%	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	220.000	OPD Provinsi, Kota Semarang, DKI Jakarta	Subbag Program

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%					12.897.864	90%	17.462.800		Sekretariat
Adm. Keuangan Perangkat Daerah					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan pelaksanaan adm. keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	11.184.477	12 Bulan	10.945.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Keuangan

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatorif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan pelaksanaan adm. keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan adm. pendukung pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	310.000	12 Bulan	363.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Keuangan
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan pelaksanaan adm. keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	3 Laporan	70.000	3 Laporan	55.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Keuangan

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan pelaksanaan adm. keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	1 Dokumen	25.000	1 Dokumen	30.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Keuangan
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan pelaksanaan adm. keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	4 Laporan	25.000	4 Laporan	30.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Keuangan

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Adm. Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan pelaksanaan Adm. Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	64.470	12 Bulan	75.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum Kepegawaian
Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan pelaksanaan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	0 Unit	-	100 Unit	50.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan pelaksanaan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah bulan pelayanan adm. kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	10.000	12 Bulan	20.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan pelaksanaan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/Seminar	10 Orang	10.000	25 Orang	25.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan pelaksanaan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	0 Orang	-	30 Orang	50.500	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan pelaksanaan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	72 Orang	86.200	100 Orang	50.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Adm. Umum Perangkat Daerah					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan pelaksanaan adm. umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	9.190	12 Bulan	25.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Nilai Kepuasan Masyarakat	80%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan pelaksanaan adm. umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	5 Unit	56.590	10 Unit	80.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan pelaksanaan adm. umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	12 Unit	74.000	1 Unit	80.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan pelaksanaan adm. umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	0	-	12 Bulan	40.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan pelaksanaan adm. umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	12 Bulan	120.000	12 Bulan	150.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan pelaksanaan adm. umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan	20.000	12 Bulan	40.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan pelaksanaan adm. umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	12 Bulan	185.000	12 Bulan	190.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan pelaksanaan adm. umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	160.000	12 Bulan	500.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan pelaksanaan adm. umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	12 bulan	11.000	12 Bulan	15.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas jabatan	0 Unit	-	1 Unit	50.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	Jumlah unit pengadaan meubelair	0 Unit	-	4 Unit	20.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	0 Unit	-	10 Unit	50.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	0 Unit	14.790	1 Unit	50.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	12 Bulan	5.000	12 Bulan	10.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD	12 Bulan	580.000	12 Bulan	600.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	1.350.000	12 Bulan	1.200.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	0 Bulan	-	12 Bulan	25.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	178.800	12 Bulan	185.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	0 Bulan	-	12 Bulan	25.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	1 Unit	275.010	1 Unit	190.000	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	12 Bulan	67.640	12 Bulan	100.500	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Nilai Kepuasan Masyarakat	85%	Persentase ketercapaian adm. pelayanan Perangkat Daerah	90%	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	12 Bulan	28.100	12 Bulan	65.500	OPD Provinsi, Kota Semarang	Subbag Umum dan Kepegawaian
	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>																

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	8.07 per 100.000											DP3AP 2KB
					Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	100%											DP3AP 2KB

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Persentase Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Daerah	34.30 %											DP3AP 2KB

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,70											

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENGARU SUTAMAKAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	90%	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	6.84 per 100.000					2.557.000	6.92 per 100.000	4.890.000		Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	90%	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	6.84 per 100.000	Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi	60%	Jumlah peserta perumusan kebijakan pelaksanaan PUG kewenangan Provinsi	30 Orang	15.000	30 Orang	85.000	Provinsi Jawa Tengah	Seksi Kualitas Hidup Perempuan

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	90%	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	6.84 per 100.000	Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi	60%	Jumlah peserta sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Provinsi	60 Orang	50.000	60 Orang	190.000	Provinsi Jawa Tengah	Seksi Kualitas Hidup Perempuan
					Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	90%	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	6.84 per 100.000	Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi	60%	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	2 Kegiatan	265.000	2 Kegiatan	2750.000	Provinsi Jawa Tengah	Seksi Kualitas Hidup Perempuan

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	90%	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	6.84 per 100.000	Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi	60%	Jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG	100 Orang	105.000	200 Orang	165.000	Provinsi Jawa Tengah	Seksi Kualitas Hidup Perempuan

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi					Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	90%	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	6.84 per 100.000	Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial	40%	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Provinsi	2.885 Orang	1.077.500	1400 Orang	680.000	Provinsi Jawa Tengah	Seksi Kualitas Hidup Perempuan

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	90%	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	6.84 per 100.000	Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial	40%	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Provinsi	100 Orang	1.025.000	2750 Orang	3.500.000	143 Desa Merah di Jawa Tengah	Seksi Kualitas Hidup Perempuan

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	90%	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender	40%					100.000	40%	110.000	Provinsi Jawa Tengah	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan,

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	62,85 %	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis hak anak	40%					175.000	40%	660.000		Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	90%	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender	40%	Persentase Layanan Konsultasi Keluarga yang responsif gender	50%	Jumlah pelaksanaan Advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender kewenangan Provinsi dan lintas Kab/Kota	2 Kegiatan	100.000	2 Kegiatan	110.000	Provinsi Jawa Tengah	Seksi Kualitas Hidup Perempuan

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	62,85 %	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak	40%	Persentase layanan konsultasi keluarga dalam pemenuhan hak anak	48,57%	Jumlah penyedia layanan komprehensif bagi keluarga	7 Kelompok	175.000	7 Kelompok	660.000	Kota Semarang, Karanganyar, Purbalingga, Rembang	Seksi Pemenuhan Hak Anak

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,02 per 100.000	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5,64 per 100.000					1.087.836	5,64 per 100.000	800.000		Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja	
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)			
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
					Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,02 per 100.000	Persentase Kabupaten/ kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejing	20%						415.000	20%	935.000		Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8.02 per 100.000	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5.64 per 100.000	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan	13,889%	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Provinsi	35 Orang	46.875	35 Orang	115.000	Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kab. Semarang, Kota Salatiga, Luar Jawa Tengah	Seksi Perlindungan Perempuan

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8.02 per 100.000	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5.64 per 100.000	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan	13.889%	Jumlah peserta Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi	195 Orang	150.336	35 Orang	550.000	Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kab. Semarang, Kota Pekalongan,	Seksi Perlindungan Perempuan

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8.02 per 100.000	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5.64 per 100.000	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan sesuai standar	100%	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang dilayani bagi perempuan korban kekerasan	100%	250.000	100%	440.000	Provinsi Jawa Tengah	Seksi Perlindungan Perempuan
---	--	--	--	---	------------------	---	------------------	---	------	--	------	---------	------	---------	----------------------	------------------------------

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8.02 per 100.000	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5.64 per 100.000	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar	100%	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	10 Orang	108.750	10 Orang	440.000	Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang	Seksi Perlindungan Perempuan

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8.02 per 100.000	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5.64 per 100.000	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	8 Kelompok	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan penyedia sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Provinsi	120 Orang	75.000	50 Orang	203.500	Wongiri, Pati, Rembang, Sragen, Sukoharjo, Banyumas, Kota Tegal, Jepara, Kudus, Cilacap, Semarang, Wonosobo, Batang	Seksi Perlindungan Perempuan

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8.02 per 100.000	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5.64 per 100.000	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	8 Kelompok	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Provinsi	100 Orang	406.875	100 Orang	242.000	Kota Semarang, Kab. Semarang, Kota Salatiga	Seksi Perlindungan Perempuan

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8.02 per 100.000	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5.64 per 100.000	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	8 Kelompok	Jumlah ketersediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Provinsi	2 Unit	50.000	1 Unit	187.000	Kab. Magelang, Klaten, Banjarnegara	Seksi Perlindungan Perempuan

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8.02 per 100.000	Persentase kab/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan secara berjejaring	20%	Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi	20 Kelompok	Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota	35 Orang	415.000	35 Orang	935.000	Semarang, Pemalang, Grobogan, Desa Dampitan	Seksi Partisipasi Masyarakat

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	62,85 %	Persentase Kabupaten/Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama	100%					539.210	100%	1.705.000		Bidang Pemanahan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	62,85 %	Persentase Kabupaten/Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama	100%	Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA	35 Kab/kota	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak	35 Orang	439.210	35 Orang	1.100.000	Kota Semarang, Kab. Magelang, Kota Salatiga, Kab. Brebes, Kab. Banyumas, Pati, Temanggung, Purworejo, Klaten	Seksi Pemenuhan Hak Anak

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	62,85 %	Persentase Kabupaten/Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama	100%	Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA	35 Kab/kota	Jumlah forum anak yang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan tingkat provinsi	35 Kelompok	100.000	35 Kelompok	605.000	Kota Semarang, Kota Magelang, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Wonogiri, Blora, Kota Tegal, Pati, Kota Salatiga, Luar Jawa	Seksi Pemenuhan Hak Anak

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	62,85 %	Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)	25%	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	15 Kelompok	Jumlah peserta KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Provinsi	35 Orang	60.000	35 Orang	82.500	Kota Semarang, Kota Surakarta, Pemalang, Purwokerto, Purworejo,	Seksi Partisipasi Masyarakat

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	62,85 %	Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)	25%	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	15 Kelompok	Jumlah lembaga mitra kerja yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak	10 Kelompok	40.000	10 Kelompok	88.000	Kota Semarang, Pemalang, Klaten, Grobogan, Kota Surakarta	Seksi Partisipasi Masyarakat

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	62,85 %	Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi	20%					200.000	20%	550.000		Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi					Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	62,85 %	Persentase keterisian indikator oleh Kab/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi	20%	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	7 Kab/Kota	Jumlah ketersediaan dokumen data gender dan anak	6 Dokumen	200.000	6 Dokumen	500.000	Kota Semarang	Seksi Data dan Informasi

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,02 per 100.000	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12,36 per 100.000					642.500	12,36 per 100.000	1.617.000		Bidang Pemanahan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,02 per 100.000	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12,36 per 100.000	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap ana	13.889%	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Provinsi	3 Kegiatan	80.000	2 Kegiatan	198.000	Kota Semarang, Kota Salatiga, Demak, Kudus, Jepara, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Batang, Purbalingga, Banyumas, Sukoharjo, Temanggung, Kota Magelang, Kab. Magelang	Seksi Perlindungan Anak
--	--	--	--	---	------------------	--------------------------------------	-------------------	---	---------	---	------------	--------	------------	---------	---	-------------------------

					Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,02 per 100.000	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12,36 per 100.000	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak	13.889%	Jumlah rakor pencegahan kekerasan terhadap anak	2 Kegiatan	46.875	2 Kegiatan	110.000	Kota Semarang, Kab Batang, Kab Banyumas, Purbalingga, Kota Salatiga, Temanggung, Pemalang, Kab Brebes, Kab Pati, Kab Sragen, Kab, Kab Wongiri, Kab Sukoharjo, Kab Sragen	Seksi Perlindungan Anak
--	--	--	--	--	---	------------------	--------------------------------------	-------------------	--	---------	---	------------	--------	------------	---------	--	-------------------------

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,02 per 100.000	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12,36 per 100.000	Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar	100%	Persentase penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	100%	225.000	100%	440.000	Provinsi Jawa Tengah	Seksi Perlindungan Anak

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,02 per 100.000	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12,36 per 100.000	Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapatkan layanan sesuai standar	100%	Jumlah rakor pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	2 Kegiatan	108.750	2 Kegiatan	440.000	Kab Sukoharjo, Kab Banyumas, Kab Pemalang, Kab Pati, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kab. Brebes	Seksi Perlindungan Anak

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,02 per 100.000	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12,36 per 100.000	Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapatkan layanan sesuai standar	100%	Jumlah KIE bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus	1 Kegiatan	50.000	2 Kegiatan	110.000	Kota Semarang, Kab Purworejo, Kab Kebumen, Kab Brebes, Kab Jepara	Seksi Perlindungan Anak

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,02 per 100.000	Persentase kab/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan secara berjejing	20%	Jumlah lembaga yg dikuatkan dan dikembangkan bagi anak yg membutuhkan perlindungan khusus	10 Kelompok	Jumlah lembaga mitra kerja yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka perlindungan khusus anak	10 Kelompok	10.000	10 Kelompok	55.000	Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang	Seksi Partisipasi Masyarakat

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,02 per 100.000	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12.36 per 100.000	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	15 Kelompok	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaa n sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	2 kegiatan	100.000	2 Kelompok	231.000	Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kab Jepara, Kab Banyumas, Kota Pekalongan, Kab Kendal, Kab Cilacap	Seksi Perlindungan Anak
--	--	--	--	---	------------------	--------------------------------------	-------------------	--	-------------	---	------------	---------	------------	---------	--	-------------------------

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,02 per 100.000	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12.36 per 100.000	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	15 Kelompok	Jumlah pelatihan bagi penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	2 Kegiatan	31.875	2 Kegiatan	80.000	Kota Semarang, Sragen, Purbalingga, Grobogan, Kab Magelang, Kab Pemanang, Pati, Kab Kendal, Kab. Sukoharjo, Kab Boyolali	Seksi Perlindungan Anak

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8.02 per 100.000	Persentase kab/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan secara berjejaring	20%	Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi	15 Kelompok	Jumlah rapat koordinasi dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	1 Kegiatan	50.000	1 Kegiatan	55.000	Kota Semarang, Pemalang, Grobogan, Klaten, Rembang, Demak	Seksi Partisipasi Masyarakat

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2,19%											DP3AP 2KB
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR	65,17%	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang	27,70%					275.000	27,70%	836.000		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, Bidang Data dan Partisipasi

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
																	Masyarakat

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	65,17 %	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang	27,70%	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK	20 Kab/Kota	Jumlah Peserta Workshop GDPK	50 Orang	105.000	50 Orang	110.000	Provinsi Jawa Tengah	Seksi Pengendalian Penduduk

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	65,17 %	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang	27,70%	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK	20 Kab/Kota	Jumlah Dokumen yang Terintegrasi dengan GDPK	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	176.000	Provinsi Jawa Tengah	Seksi Pendalian Penduduk

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	65,17 %	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang	27,70%	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK	20 Kab/ Kota	Jumlah peserta Workshop Advokasi Pendidikan Kependudukan dan Fasilitasi Pembentukan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)	105 Orang	100.000	35 Orang	550.000	Provinsi Jawa Tengah	Seksi Pendalian Penduduk

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi					Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	64.76 %	Persentase kab/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	35%	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	25.000	1 Dokumen	82.500	Kota Semarang	Seksi Data dan Informasi

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	65.17 %	Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	30%					1.175.000	31%	4.180.000		Bidang Keluaraga Berencana dan Advokasi KIE
					Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	65.17 %	Unmetneed KB	12,76%					80.000	12,66%	4.180.000		

Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	65,17 %	Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	30%	Jumlah peserta KB Aktif	4.901.017 Orang	Jumlah peserta penggerak advokasi dan KIE program KKBP melalui Mitra Kerja	1.100 Orang	450.000	1.100 Orang	990.000	Provinsi Jawa Tengah	Seksi Advokasi KIE
---	--	--	--	---------------------------------	---------	---	-----	-------------------------	-----------------	--	-------------	---------	-------------	---------	----------------------	--------------------

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	65,17 %	Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	30%	Jumlah peserta KB Aktif	4.901.017 Orang	Jumlah peserta Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	7.500 Orang	725.000	40.000 Orang	2.750.000	Provinsi Jawa Tengah	Seksi Keluaraga Berencana

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB					Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	65.17 %	Unmetneed KB	12,76%	Persentase peran aktif PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa) dalam pembinaan kesertaan berKB	17,5%	Jumlah PPKBD yang berperan serta aktif dalam pembinaan kesertaan ber-KB	180 Orang	80.000	1.600 Orang	440.000	Provinsi Jawa Tengah	Seksi Keluaraga Berencana
--	--	--	--	--	---------------------------------	---------	--------------	--------	---	-------	---	-----------	--------	-------------	---------	----------------------	---------------------------

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					Indeks pembangunan keluarga	56,29	Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan	96,3%					200.000	96,3%	550.000		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Indeks pembangunan keluarga	5,29	Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan	91%					175.000	91%	500.000		

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Indeks pembangunan keluarga	56,29	Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota	30%					75.000	30%	165.000		Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					Indeks pembangunan keluarga	56,29	Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan	96,3%	Jumlah kelompok tribina yang aktif	21.540 Kelompok	Jumlah peserta Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	175 Orang	200.000	250 Orang	550.000	Provinsi Jawa Tengah	Seksi Keluaraga Sejahtera

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				Indeks pembangunan keluarga	56,29	Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan	91%	Jumlah Kelompok UPPKS yang aktif	7.000 Kelompok	Jumlah peserta Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	80 Orang	175.000	250 Orang	550.000	Provinsi Jawa Tengah	Seksi Keluaraga Sejahtera
--	--	--	--	-----------------------------	-------	---	-----	----------------------------------	----------------	--	----------	---------	-----------	---------	----------------------	---------------------------

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Pemda		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung Jawab / Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian Indikator	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran sub Kegiatan		Rp. (000)	Target Indikator	Rp. (000)		
							Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target	Tolok Ukur (indikator)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Indeks pembangunan keluarga	56,29	Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kab/kota	30%	Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga	35%	Jumlah mitra dan organisasi masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pembangunan ketahanan keluarga	25 Kelompok	75.000	35 Kelompok	165.000	Pemalang, Grobogan, Rembang, Blora, Kota Salatiga, Jepara, Brebes	Seksi Partisipasi Masyarakat

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka pendek serta alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran (APBD dan APBN) tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain: 1) memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Perubahan Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD; 2) mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besarnya mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Perubahan Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD; 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

Harapannya, keberhasilan pembangunan jangka pendek untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2023 yaitu “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”.

Beberapa kaidah pelaksanaan Renja 2023 yang perlu diatur antara lain:

1. Sekretariat dan bidang-bidang di Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh pegawai pada Sekretariat dan bidang-bidang di Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai;
3. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu satu tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Perubahan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renja, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan program maupun kegiatan Perubahan Renja secara berkala;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak lanjut disusunnya Rencana Kerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Melakukan upaya optimal terhadap peningkatan peran perempuan utamanya dalam bidang ekonomi dan politik serta peningkatan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah;
2. Advokasi secara penuh terhadap pemenuhan hak anak di kabupaten/kota dan peningkatan pelembagaan PUHA pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
3. Melakukan upaya pencegahan dan pengurangan risiko kelompok rentan perempuan dan anak secara berkelanjutan sampai ke tingkat desa dengan melibatkan mitra kerja dan organisasi masyarakat serta stakeholder di kabupaten/kota;
4. Melakukan upaya peningkatan kualitas layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama jejaring mitra kerja dan kabupaten/kota serta mengembangkan teknologi informasi untuk mendukung upaya tersebut;
5. Melakukan upaya optimal guna meningkatkan kesertaan keluarga berencana melalui optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dukungan layanan KB, penggerakan dan peningkatan peran serta mitra kerja, organisasi masyarakat dan dunia usaha, serta efektivitas Kampung KB;
6. Mendorong implementasi Grand Desain Pembangunan Keluarga (GDPK) di daerah sebagai upaya mendorong peningkatan pengendalian kuantitas penduduk dan kualitas penduduk serta pembangunan kualitas keluarga yang responsif gender dan anak;
7. Perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan keterlibatan keluarga dan peran aktif kelompok Tribina serta pemberdayaan UPPKA secara efektif dan berkelanjutan.